

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat di simpulkan bahwa adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Untuk melihat hasil evaluasi dalam pelaksanaan di Desa wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

1. Proses menunjukkan bahwa Suatu pelaksanaan kebijakan dengan adanya keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tersebut haruslah memadai sarana dan praserana untuk mendukung suatu pelaksanaan implementasi program kartu Indonesia sehat (KIS)
2. Tujuan Kebijakan ini pada dasarnya adalah suatu program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, dan tujuan tersebut harus dilakukan oleh instansi yang memiliki suatu wewenang dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera dalam suatu kebijakan tertentu

3. Dampak/ Efek. adalah suatu kelambatan atau kekurangan faktor input keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang di harapkan tidak cukup dalam implementasi KIS diantaranya seperti kurangnya ketelitian para aparat pelaksanaan dalam menjalankan program kartu indonesia sehat (KIS) serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang kuarang memadai.
4. Tingkat Perubahan Dimana tingkat pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah selalu mamadai

5.2 Saran

Demi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang lebih baik, maka penulis ingin memberi saran terhadap pihak yang terkait di Desa Wederok, sebagai berikut

1. Di sarankan kepada petugas BPJS kesahatan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang jaminan kesehatan nasional di tingkat masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jaminan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Di sarankan kepada petugas pelaksana program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk perlu meningkatkan keberhasilan implementasi program ini dimasa depan.

3. Kepada pemerintah Desa perlu melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur, meningkatkan pendanaan dan sarana prasarana aparatur guna mendukung pelaksanaan Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)
4. Kepada pemerintah Desa juga perlu meningkatkan koordinasi antara pegawai/aparat yang terlibat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
5. Harus adanya kesadaran masyarakat tentang penting program Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena dengan adanya kebijakan program ini dapat membantu meringankan biaya pengobatan.
6. Disarankan kepada masyarakat yang masih tergolong kurang mampu agar segera mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya untuk menjadi peserta JKN-KIS karena program ini juga bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, 2015. Kebijakan publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pngabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bnndung.
- Agostiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2010.
- Danawita, S. (2018) Analisis Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Islam Karawang”. eJournal Pemerintahan Integratif, 12 (4) : 356-369
ISSN 3458-9671 ejournal.pin.or.id © Copyright 2018.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. *Stiacimahi. Ac. Id*, 14(November), 13–25.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat) Dikson*. 21(2), 46–65.
- Grindle, Merielle S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey Princeton University Press.
- Mita, M. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Msengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Niha, M. R., Korompis, G. E. C., & Mandagi, C. K. F. (2018). Hubungan Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Jkn-Kis) Dengan Status Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jkn-Kis Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Kesmas*, 7(5) 1–9.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Kesmas/Article/View/22522>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan jaminan kesehatan Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung. Alfabeta
- Tabilantang, A. I., & Dengo, S. (2011). No Title. *Program Kartu Indonesia Sehat (Kis) Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Di Desa Kopandakan Ii Kecamatan Lolayan)*.
- Muhammad, I., A. (2016). Responsivitas Pelayanan Publik. *eJournal Administrasi Negara*, 2014, (3) : 1645-1654
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, M. (2014) Kemiskinan Identifikas Penyebab dan Penanggulangannya. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI bersama publica press.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Pasolong, H. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)
- Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h.21-48.

Simbolon, Naomi Rahmawati Br. 2020. Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2) 2020: 147-155

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Westra, Pariata. 2018. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

SUMBER LAIN

Kemenkes RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: RI; 2015.

Kemenkes RI, 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Kemenkes RI, Jakarta

<https://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2014/291/Ini-yang-PerluAnda-Ketahui-Soal-Kartu-Indonesia-Sehat>.

<https://www.Anarenews.com/berita/462706/tegaskan-kis-punya-dasar-hukum>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Hak Jaminan Sosial, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Penmanfaatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan.

Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan.